

CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETJEN WANTANNAS



EDISI XXIV
JULI 2018



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi
Salam Damai Sejahtera Bagi Kita Semua
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan

Perdamaian adalah kata yang paling diinginkan oleh banyak negara. Mengapa demikian? Karena di dalam perdamaian, banyak hal positif yang bisa dilakukan termasuk merencanakan masa depan sebuah bangsa. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, tak bisa dipungkiri kalau masyarakat Indonesia disajikan informasi yang terkadang justru bersifat kebalikannya. Penggunaan media sosial yang tidak bijak, akrobatik para politisi, dan tayangan di media *mainstream* yang kerap memperlihatkan bagaimana kebebasan berpendapat digunakan tanpa pernah melihat bagaimana efek kedepannya untuk bangsa ini.

Setjen Wantannas dengan Sarasehan Nasionalnya yang bertemakan Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur, mencoba mengingatkan bahwa kita bisa belajar dari sebuah kejadian yang pernah terjadi di wilayah Maluku beberapa tahun silam. Bahwa ketidakhati-hatian serta selalu mengedepankan emosi ternyata telah menggerus nilai-nilai perdamaian dan menimbulkan banyak kemudharatan.

Hidup damai di negeri yang penuh toleransi dan saling menolong merupakan warisan yang sudah ditanamkan oleh para leluhur bangsa ini, dalam kedamaian ada senyuman putra putri bangsa, dalam senyuman ada optimisme sebagai sebuah bangsa yang damai, dan dalam senyuman ada keyakinan untuk masa depan yang lebih baik. Bulan Agustus mendatang bangsa Indonesia akan menyongsong hari jadi kemerdekaannya yang ke-73. Banyak asa dan syukur tertancap di dalam hati. Kemerdekaan adalah cita-cita setiap bangsa, dan bangsa Indonesia sudah menggenggamnya melalui proses yang sangat panjang.

Catra mengajak kita untuk terus memelihara perdamaian di dalam nafas kemerdekaan demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Memang tidak mudah untuk terus menjaga dan merawat perdamaian, namun bangsa Indonesia bukanlah bangsa dengan peradaban yang rendah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan segala tradisi yang diwariskan oleh pendiri bangsa ini.

REDAKSI



Redaksi

MAJALAH CATRA

Jl. Medan Merdeka Barat No.15

Jakarta Pusat - 10110

Telp. 021- 3863983 Fax 021-3441683

email: rodangmas@dkn.go.id

DAFTAR ISI

OPINI



- 4 MENGUKUR DAN MENGANTISIPASI POTENSI ANCAMAN PADA PILPRES 2019



- 6 ANAK INDONESIA YANG SEHAT CERMIN NEGARA YANG KUAT

TAJUK UTAMA



- 9 MERENUNGAN MAKNA MERAWAT PERDAMAIAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH



- 14 PEMERINTAH REVISI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2018

INFO KITA



- 16 SEMANGAT NAWACITA JADI INSPIRASI LETJEN TNI DONI MONARDO UNTUK SELENGGARAKAN LATIHAN SIMULASI INSIDEN SIBER



- 18 WAPRES JK UNGKAP FAKTA KONFLIK DI MALUKU PADA ACARA SARASEHAN NASIONAL



- 20 LETJEN TNI DONI MONARDO UPAYAKAN GRASI UNTUK NARAPIDANA ASAL MALUKU

Inspirasi Bulan Ini

MENGHADAPI 'BERUANG GANAS' DI KANTOR

Alkisah ada dua orang ahli biologi sedang berada di lapangan untuk mencari jejak beruang liar. Tiba-tiba, beruang liar itu keluar dari sarangnya dan tepat berada di depan mereka. Mereka berdua memanjat pohon terdekat, tetapi beruang mulai memanjat pohon itu lebih cepat dari mereka. Ahli biologi pertama mulai melepas sepatu bot kulit *hikingnya* dan menarik sepasang sepatu lari dari tas punggungnya. Ahli biologi kedua memberinya tatapan penuh kebingungan dan berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan?"

Dia menjawab, "Aku akan menghitung ketika beruang itu mendekati kita, dan kita akan melompat turun dan lari."

Orang kedua mengatakan, "Apakah kau gila? Kita berdua tahu kamu tidak dapat berlari lebih cepat dari beruang liar dewasa." Orang pertama berkata, "Aku tidak perlu berlari lebih cepat dari beruang itu, aku hanya perlu berlari lebih cepat dari kamu!" dengan begitu beruang pasti akan mengejar kamu bukan aku.

RENUNGAN:

Dalam sebuah pekerjaan, seringkali kita temukan 'beruang ganas' yang mengobrak-abrik dan mengancam zona nyaman kita. Dalam hal ini, Kesolidan dan kekompakan tim menjadi taruhannya. Tindakan yang paling mudah dilakukan adalah mengumpulkan dan menyalahkan orang lain yang menjadi mitra kita. Karena dengan begitu, kita punya kesempatan untuk melarikan diri sekencang-kencangnya dan terbebas dari tanggung jawab.

Dari sudut pandang kebaikan, tindakan yang dilakukan oleh orang pertama itu adalah tindakan pengecut dengan mencari kambing hitam, mengorbankan orang lain dan mementingkan diri sendiri. Sebagai sebuah tim, seharusnya mereka berpikir, berusaha, dan bertindak serta bekerja sama mencari jalan bagaimana caranya menghalau 'beruang ganas' tersebut. Namun, pertimbangannya ada di hati nurani Anda.

DESI

MENGUKUR DAN MENGANTISIPASI POTENSI ANCAMAN PADA PILPRES 2019



Oleh: Hulman Napitupulu, SH

Pemilihan serentak (Pilpres dan Pilleg) 2019 segera akan berlangsung. Situasi pasca Pilkada DKI 2017 berlanjut dan seolah hadir kembali dalam bentuk yang baru. Akselerasi persaingan politik sudah mulai tampak dipermukaan, baik di media massa maupun media sosial dengan bentuk munculnya isu-isu berlatarbelakang sentimen identitas (SARA), primordial maupun faktor sosial lainnya seperti gender, atau afiliasi politik.

Kondisi ini memicu terjadinya segregasi sosial yang tajam di masyarakat dan berujung pada begitu mudahnya terjadi perpecahan atau konflik. Fenomena ini dapat menjadi ancaman serius bagi kedamaian dan keutuhan bangsa. Untuk itu, pemerintah telah melakukan upaya kanalisasi secara cepat, misalnya dengan lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi Massa serta pengakuan negara akan agama-agama lokal sebagai ungkapan pengakuan negara akan keragaman serta terbangunnya perdamaian namun eskalasi ancaman/potensi konflik tetap tinggi.

Meskipun pada 2018 berlangsung juga Pilkada serentak di 5 (lima) provinsi dengan penduduk terbesar dan heterogenitas penduduk

yang juga tinggi (khususnya di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan), namun kondisinya berbeda dengan Pilkada DKI 2017 dimana pada Pilkada DKI 2017 telah dibenturkan antara isu agama (Islam) di satu sisi dan Etnik (Tionghoa) di sisi yang lain, yang masing-masing mewakili identitasnya dan dipersepsi sedemikian rupa sehingga seolah-olah merupakan pertentangan antara pihak warga beragama Islam melawan pihak pemodal, dunia usaha, yang diidentikkan sebagai simbol untuk etnik keturunan Tionghoa.

Peristiwa politik yaitu Pilkada DKI 2017, jelas telah memunculkan satu fenomena yang dapat mengancam kedamaian dan keutuhan bangsa. Situasi tersebut bagaimanapun tidak terdapat pada kelima pilkada serentak 2018 yang berlangsung saat ini, sehingga kekhawatiran akan potensi konflik serupa akan jauh lebih tinggi pada pelaksanaan Pilpres dan Pilleg 2019.

Disadari atau tidak, upaya-upaya berbagai pihak untuk meningkatkan intensitas persaingan yang akan mengarah pada perseteruan berdasarkan politik identitas sesungguhnya telah terjadi dengan berbagai modus dan proses. Akumulasi ancaman akan terjadinya konflik sosial

sebetulnya juga sudah mulai berlangsung melalui pengerahan massa dengan jargon-jargon tertentu yang diusung sebagai pengikat antar kepentingan yang seolah-olah menunjukkan keberpihakan pada kaum masyarakat miskin dan terpinggirkan sekaligus dengan cap agama sebagai penguat, namun tujuan sesungguhnya adalah perebutan kekuasaan.

Cara-cara lain yang digunakan adalah dengan melontarkan isu-isu tertentu terkait kebijakan pemerintah, disertai fakta yang diajukan secara tidak lengkap sehingga terjadi penyesatan makna bagi publik yang awam soal kebijakan dimaksud sebagai contoh adalah isu-isu tentang hutang luar negeri, kebijakan pembatasan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan lain sebagainya.

Penggabungan pemilu serentak, di satu sisi memang mendatangkan keuntungan, tapi di sisi lain juga terjadi penggandaan beratnya tantangan potensi konflik. Pemerintah beserta segenap komponen bangsa harus mempersiapkan energi untuk terus menjaga dan mempertahankan Indonesia sebagai bangsa yang besar, membangun negara-bangsa atas dasar semangat Pancasila, memperkokoh rasa kesatuan, kebersamaan dalam keberagaman dan toleransi, menumbuhkan sifat

intoleransi yang semakin meningkat. Selain itu, penggunaan isu SARA terutama dengan narasi agama dan etnik berpotensi dimunculkan kembali terutama terkait pilpres mendatang untuk mempengaruhi orang sebagai bagian dari strategi politik untuk mencapai kekuasaan.

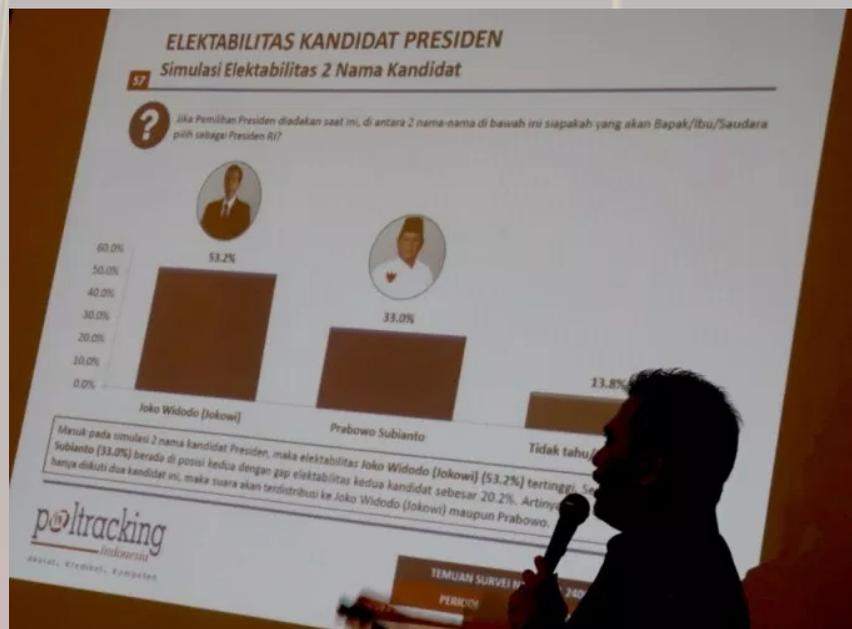
Mudahnya penggunaan dan luasnya jangkauan media sosial saat ini, menambah akselerasi potensi konflik dengan cara menyebarkan informasi dan disinformasi termasuk memviralkan fakta-fakta tentang brutalitas kekerasan untuk mendistorsi akal sehat warga masyarakat dan menggiring mereka untuk melakukan hal-hal yang sejatinya berada di luar hati nuraninya. Jika proses memilih pemimpin bangsa dilakukan dengan cara-cara memecah belah komponen bangsa seperti itu, sulit bagi kita untuk masih berharap akan diperolehnya hasil yang sesuai dengan komitmen para pendahulu bangsa.

Untuk itu, pemerintah bersama-sama dengan penyelenggara pemilu perlu memperkuat aturan dan batasan-batasan dalam berkampanye terkait dengan penggunaan isu SARA termasuk pada saat-saat sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan pemilu serentak. Dalam hal ini lembaga negara harus segera menyusun sistem integritas dan kode etik untuk partai politik yang memuat sanksi yang tegas kepada setiap peserta pemilu dan dapat dibatakannya keikutsertaan suatu partai dalam pemilu jika menggunakan isu SARA.

Tidak hanya sekedar sanksi tertulis saja, tetapi penyelenggara pemilu harus secara tegas dan konsisten melaksanakan/mengeksekusinya dalam kenyataan. Selain itu, pemerintah mendorong serta memfasilitasi dan memperkuat efektifitas dialog antar agama serta mengakomodasi kearifan lokal sebagai mekanisme untuk mencegah dan meresolusi konflik.

Semoga pemilu serentak 2019, dapat berjalan lancar dan meriah sebagai sebuah pesta demokrasi, serta mampu

menghasilkan pemimpin bangsa yang amanah dan mampu membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita, setidaknya untuk 5 tahun ke depan.****



empati, rasa saling percaya (*trust*) antara warga bangsa, menumbuhkan harapan positif serta rasa cinta tanah air, memperkecil disparitas politik dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadilan, lebih mengedepankan perang gagasan.

Potensi konflik pada tahun politik 2019 sangat rentan. Hal itu dapat dilihat dari parameter konflik yang ada, seperti mobilitas sosial dan angka

ANAK INDONESIA YANG SEHAT CERMIN NEGARA YANG KUAT



Foto: internet

Oleh: J. Haryadi

Anak-anak adalah aset bangsa. Keberadaan mereka sangat penting bagi keberlangsungan bangsa ini. Jika semua anak-anak Indonesia sehat jasmani dan rohaninya, tentu berdampak positif bagi peradaban yang akan datang.

Tumbuh kembangnya anak tidak terlepas dari nutrisi yang dikandung dalam makanan yang dikonsumsi mereka, serta kondisi sosial tempat mereka tinggal. Bagaimana mereka bisa sehat, jika makanannya tidak bergizi? Bagaimana jiwa mereka menjadi kuat, jika lingkungan sosialnya tidak kondusif?

Sayangnya, tidak semua anak di Indonesia beruntung. Banyak anak yang berada dalam lingkungan kumuh dan kurang mendapatkan makanan bergizi. Ada juga anak yang berada dalam keluarga mampu, tetapi orangtuanya tidak harmonis. Lebih parah lagi adalah anak-anak terlantar yang sengaja lari dari keluarganya karena terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau sengaja ditinggal pergi oleh orangtuanya yang tidak bertanggung jawab.

Bisa kita bayangkan, ketika masa kecil anak-anak tersebut tidak bahagia, maka pertumbuhan fisik dan mentalnya pasti ikut terganggu. Sementara mereka ini merupakan generasi penerus dan calon pemimpin di masa depan.

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan

Nasional (Bappenas) 2013, jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Menurut kelompok umur, penduduk yang masih tergolong anak-anak (0-19 tahun) mencapai 92,73 juta jiwa atau sekitar 35% dari total populasi (sumber: databoks.katadata.co.id). Tentu angka tersebut tidak sedikit, sehingga perlu perhatian serius dari kita semua untuk mengatasi masalah anak-anak ini.

DEFINISIANAK

Menurut Undang-Undang (UU), pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Sementara itu berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

ANAK DAN PERMASALAHANNYA

Masalah anak ini cukup kompleks dan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi lingkungan sosial yang tidak mendukung. Misalnya adanya KDRT, kemiskinan, informasi media, dan sebagainya.

Anak-anak yang mengalami KDRT umumnya berasal dari keluarga *broken home*, sehingga terjadi perceraian. Dampak dari perceraian ini berimbas negatif terhadap pertumbuhan anak-anak mereka, terutama perkembangan mentalnya.

Faktanya, Indonesia berada pada ranking teratas jumlah perceraian tertinggi di dunia. Bahkan, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan bahwa pada 2016 tercatat ada lima masalah aduan anak terkait perceraian, yaitu (a) Korban hak asuh 86 kasus (b) pelarangan akses bertemu orang tua 193 kasus (c) penelantaran ekonomi 124 kasus (d) anak hilang dan (e) penculikan keluarga.

Kondisi hancurnya sebuah keluarga sangat

berpengaruh terhadap kualitas generasi. Efek dari keluarga yang tidak harmonis sangat berpengaruh terhadap mental anak. Mereka menjadi pribadi yang labil, tidak percaya diri, pendiam, emosional, dan anti sosial. Faktor kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan mental anak.

Pengaruh teknologi informasi yang begitu pesat juga berpengaruh terhadap anak. Mereka yang kebetulan berada dalam keluarga ekonomi mapan justru dimanja dengan perangkat teknologi canggih. Bukannya dipakai untuk belajar, perangkat tersebut justru digunakan untuk bermain *games*, mengakses situs dewasa, membaca artikel yang berisi informasi tidak benar (*hoax*), menonton adegan kekerasan, serta beragam informasi menyesatkan lainnya.

Anak-anak juga rentan terhadap pelecehan, baik dalam bentuk gangguan secara fisik maupun psikologis. Pelecehan bisa dilakukan oleh teman-temannya dengan cara dipukul atau hanya sekadar di *bully* dengan kata-kata yang menyakitkan. Efeknya anak menjadi trauma dan kehilangan rasa percaya diri.



Foto: internet

SOLUSI MELINDUNGI ANAK INDONESIA

Melihat begitu banyaknya anak-anak yang rentan terhadap efek negatif dari berbagai persoalan sosial, maka pemerintah dan segenap elemen masyarakat harus ikut bertanggung jawab menjaga agar mereka bisa diselamatkan. Beberapa solusi yang bisa ditawarkan diantaranya adalah:

1. Anak-anak perlu mendapat pendidikan dan bimbingan yang layak dalam keluarga

Orang tua wajib mendidik dan membimbing anak-anaknya agar terhindar dari berbagai hal negatif yang bisa mempengaruhi pertumbuhan fisik dan mentalnya. Selain menjaga gizi anak, orang tua juga wajib menjaga keharmonisan rumah tangganya. Mereka tidak boleh egois dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Anak-anak harus dibesarkan dengan kasih sayang dalam keluarga yang utuh dan mampu menjaga pergaulannya, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan.

Negara berkewajiban menyelamatkan warga negaranya. Anak-anak yang mengalami KDRT sebaiknya direhabilitasi dan mendapat perlindungan oleh negara. Orang tua yang tidak mampu mendidik dan melindungi anak-anaknya dan justru menyiksa mereka, harus dipisahkan dari anak-anaknya. Negara harus mengambil alih peran orang tua dalam mendidik anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak.

2. Anak terlantar dan korban KDRT wajib diurus oleh negara

Pemerintah melalui berbagai lembaga yang kompeten wajib melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Para remaja harus terproteksi dari bujuk rayu para bandar narkoba yang memanfaatkan kaki tangan mereka untuk menjerumuskan remaja ke dalam lingkaran pecandu narkoba.

3. Pengawasan ketat terhadap peredaran narkoba di lingkungan sekolah.

Pemerintah juga wajib melakukan upaya maksimum dalam meredam peredaran konten pornografi, kekerasan, radikalisme, dan hoax yang ada di internet. Caranya dengan melakukan sweeping secara berkala dan melakukan tindakan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran. Hukuman para pelanggar perlu diperberat agar dapat menimbulkan efek jera.

4. Blokir konten negatif di internet dan pemberantasan hoax

5. Penguatan pendidikan agama, kearifan lokal, dan budi pekerti

Pemerintah perlu menggiatkan kembali pendidikan yang bernuansa religi kepada anak-anak sekolah. Selain itu juga mengaktifkan mata pelajaran bernuansa lokal yang bersifat positif dan mampu membangun karakter anak, seperti misalnya pesan-pesan moral yang ada dalam budaya masyarakat setempat dan pendidikan budi pekerti.

MERENUNGGAN MAKNA MERAWAT PERDAMAIAN



Tidak pernah terbayangkan dalam benak penulis bahwa suatu saat di tanah kelahirannya, akan ada sekurangnya 21 batalyon prajurit yang mengemban tugas di Maluku. Periode paruh akhir dekade '90an tersebut merupakan masa-masa yang tidak mudah untuk dilupakan. Pada masa itu, penulis menginjakkan kaki kembali di tanah Maluku tahun 1999 dengan satu tugas, melakukan kegiatan penelitian terkait satu modal kekayaan rakyat Maluku, yaitu bahasa.

Belum terbenam mentari di ufuk Barat, di hari pertama kedatangan, sejumlah panggilan telepon masuk ke kediaman penulis, di mana panggilan telepon tersebut berdatangan dari para senior, walau berlainan keyakinan dan suku, namun beliau-beliau yang menelepon dalam kultur budaya penulis, adalah mereka yang dituakan, dan wajib didengar pesannya.

Di ujung telepon, suara para orang tua tersebut penuh kerinduan sekaligus kekhawatiran, mengingat lamanya penulis meninggalkan tanah kelahiran, kedatangan kali itu diharapkan tidak menyebabkan penulis menemui kesulitan. Sejumlah pesan dari para sahabat dan saudara orang tua penulis ini masih terngiang sampai saat ini, suatu wujud kepedulian yang tidak ada duanya, yang harus disampaikan mengingat saat itu kondisi tanah Maluku sedang dalam keadaan tidak menentu.

Kekhawatiran para orang tua ini makin bertambah, saat penulis menyampaikan bahwa topik penelitian penulis adalah bahasa-bahasa tradisional, yang dikenal sebagai *bahasa tana*. Pertanyaan senada yang muncul saat itu ialah mengapa harus menjalankan penelitian kebahasaan di dalam situasi di mana sangat sulit

berjumpa dengan pihak-pihak yang layak menjadi narasumber, mengingat situasi kebahasaan di Maluku sangat unik.

Di Maluku, jika berbicara mengenai bahasa, maka harus dibedakan antara penggunaan bahasa-bahasa tana dengan Bahasa Melayu, seperti Bahasa Melayu Ambon. Bahasa Melayu Ambon, yang dalam kode ISO 639-3:2007 dikenal sebagai [abs], adalah bahasa yang tergolong *lingua franca*, suatu bahasa yang dipergunakan sebagai bahasa pengantar oleh kurang lebih 1,650 juta penutur, di mana kurang lebih 250 ribu penutur menggunakannya sebagai bahasa pertama, dan 1,4 juta penutur menggunakannya sebagai bahasa kedua. Tentunya penelitian mengenai bahasa ini akan lebih mudah.

Namun penulis berencana melakukan penelitian terhadap Bahasa Haruku (hrk), suatu bahasa yang penuturnya kurang dari 100 ribu penutur. Status bahasanya menurut skala EGIDS (*Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale*), tergolong sebagai bahasa 8a (*moribund/hampir hilang*), atau bahasa yang harus dilestarikan tidak hanya dengan mengandalkan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, namun memerlukan adanya mekanisme pelestarian dari luar rumah. Bahasa ini memiliki sejumlah dialek, yang cenderung lebih lestari di negeri-negeri yang penuturnya beragama Islam, sementara di negeri-negeri Kristen rata-rata penuturnya adalah generasi tua (jika masih ada). Adapun persamaan antar dialek satu dengan lainnya berkisar pada 80 persen ke atas. Setiap anak Maluku memahami situasi kebahasaan ini.

Oleh karena tujuan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan Bahasa Haruku beserta dialeknya oleh tiap generasi, dan antar

generasi serta meninjau sejauh mana domain (wilayah) kebahasaan bahasa tersebut digunakan. Maka, tentunya bertemu penutur asli adalah hal yang esensial.

Di masa itu, untuk melakukan rangkaian perjalanan ke negeri-negeri Kristen yang penutur aslinya adalah generasi tua akan menjadi sulit, mengingat situasi di Maluku saat itu cukup rawan untuk melakukan perjalanan. Hal yang lebih sulit lagi bagi penulis, dan nampaknya sangat sulit terbayangkan oleh para orang tua bahwa akan bisa terwujud, adalah untuk menemui para penutur asli dari generasi yang lebih muda yang masih menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Tentunya para orang tua khawatir karena adanya perbedaan keyakinan antara penulis dengan sebagian calon narasumber. Kekhawatiran tersebut dilandasi oleh rasa cinta kasih para orang tua yang sampai harus bersusah payah menelepon seorang anak muda, karena anak sahabat mereka adalah juga anak mereka.

Rata-rata para orang tua yang menelepon sambil memberikan nasehat juga sesekali menyampaikan permintaan maaf, karena tidak bisa berjumpa atau setidaknya mengantarkan penulis. Alhasil, rencana penelitian yang sudah dikemas sedemikian rupa, dirubah sesuai masukan dan nasehat para beliau, dengan dilakukannya pembatasan penelitian terhadap generasi penutur tertentu dan komunitas penutur di sekitarnya.

Sebagian pembaca mungkin saja bertanya-tanya, kenapa penulis merasa perlu untuk tetap melakukan penelitian terhadap bahasa-bahasa tradisional, dan mengapa di negeri-negeri Kristen bahasa tana cenderung menurun penggunaannya. Keputusan penulis didorong juga oleh kesadaran bahwa bahasa di Maluku adalah modal persatuan. Kesamaan bahasa yang walau berbeda dialek itulah yang menyebabkan para pejuang Maluku dapat bersatu melawan penjajah di era Pattimura dan seterusnya.

Para pejuang yang melawan penjajah ketika itu berlatar keyakinan yang berbeda-beda, namun memiliki persamaan budaya dan tentunya bahasa. Hal inilah juga yang menyebabkan Belanda kemudian berusaha memecahkan persatuan dengan memaksakan penggunaan Bahasa Melayu di negeri-negeri Kristen, dengan jalan mewajibkan generasi penutur asli mempelajari dan menggunakan bahasa Melayu bagi generasi yang lebih muda. Bahasa Melayu pun digunakan di bangku pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang berhasil didirikan pemerintah kolonial di negeri-negeri Kristen.

Pada akhirnya, belajar dari proses perdamaian konflik horisontal yang terjadi di Maluku, yang bisa menyebabkan terciptakan perdamaian adalah akar budaya persaudaraan yang tertanam jauh sebelum datangnya era Kolonialisme Barat di

Maluku.

Sebagaimana penulis sampaikan di awal tulisan ini, begitu banyaknya jumlah aparat keamanan yang bertugas di Maluku saat konflik, namun belum berhasil membawa perdamaian.

Pertemuan Malino, menjadi suatu wujud percontohan, bahwa pada akhirnya, rakyat Maluku sendiri yang harus aktif

dilibatkan dalam proses perdamaian. Kesediaan orang Maluku, untuk terlibat dalam proses perdamaian, digaungkan jauh ke dalam sanubari melalui pendekatan budaya yang hanya dipahami orang Maluku sendiri, yaitu saat berangkat ke Malino, adalah saat berangkat bertemu saudara sendiri.

MERAWAT PERDAMAIAN

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan perdamaian yang ada, atau meminjam istilah yang digunakan dalam Sarasehan Nasional Setjen Wantannas (10-11 Juli 2018), yaitu merawatnya. Kembali lagi penulis membawa pembaca untuk melihat bagaimana Sarasehan Nasional tentang Merawat Perdamaian di Maluku ke dalam konteks kebahasaan.

Hal ini dipandang paling baik karena berbagai tulisan mengenai proses perdamaian di Maluku, maupun berbagai konteks penyelesaian konflik horisontal yang banyak dijumpai di masyarakat telah banyak mengupas sisi politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya.

Sebelum lebih jauh, adalah baik untuk disadari bahwa bagian tulisan berikut ini disebut bukanlah hal yang baru karena ilmu bahasa pada dasarnya berkembang dari apa yang penutur

"Apabila berbicara tentang konflik M banyak orang menyangka itu konflik M. Memang pada akhirnya adalah konflik agama, tapi sebabnya bukan konflik agama,"

Muhammad Jusuf Kalla

Wakil Presiden Republik Indonesia

Foto: internet

bahasa lakukan secara 'tidak terumuskan secara ilmiah' namun penutur bahasa menyadari atau setidaknya mencoba mewakili apa yang ingin



disampaikan, melalui penggunaan bahasa. Adalah tugas para ahli untuk dapat memberikan penjelasan rasional atau ilmiah terhadap apa yang dilakukan penutur atau manusia.

Dalam pendekatan ilmu Sintaksis, dikenal adanya *head* dan *modifier*. Frasa Merawat Perdamaian adalah kelompok kata di mana 'perdamaian' adalah *head*-nya, atau pusat atau intinya. Adapun 'merawat' adalah *modifier* menerangkan apa yang terjadi dengan *head*. Dengan demikian adalah cukup menarik untuk mengamati apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan 'perdamaian' terlebih dahulu, sebelum kemudian masuk kepada 'merawat.'

Kata 'Perdamaian' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata 'damai' yang mengandung tiga makna yaitu yang berkaitan dengan situasi lapangan, perasaan yang tercipta, serta hubungan antar manusia. Dalam situasi lapangan yang damai, dimaknai bahwa tidak ada perang, tidak ada kerusuhan dan aman. Perasaan yang dikatakan damai adalah rasa tenteram dan tenang:

Selain itu, hubungan antar manusia yang damai dimaknai sebagai hubungan di mana manusia berada dalam keadaan tidak bermusuhan, dan manusia rukun dengan sesamanya. 'Perdamaian' sendiri mengandung makna penghentian permusuhan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal berdamai.

Adapun menurut KBBI, kata 'merawat'

berasal dari kat dasar 'rawat' yang mengandung tiga arti, yaitu 'pelihara', 'urus', dan 'jaga'. Sementara itu, kata 'merawat' sendiri memiliki empat makna, yaitu memelihara, menjaga, mengurus, dan membela (orang sakit). Tentunya tema Sarasehan Nasional tersebut menyiratkan perlunya memelihara perdamaian, menjaga situasi perdamaian itu sendiri. Entah disadari atau tidak, kata 'merawat' ini menunjukkan tanggung jawab yang sangat besar yang harus diemban oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini karena merawat itu tidak hanya mengandung unsur memelihara dan menjaga, namun juga mengurus, dan membela.

Berkaitan dengan 'merawat', dalam perenungan penulis, pewujudan makna menjaga dan memelihara adalah hal yang juga banyak dibahas, namun mengurus dan membela perlu mendapat perhatian yang lebih lagi. Mengurus mengandung makna mengatur segalanya, untuk menjadi lebih baik dan tertata, di samping menyelenggarakan, memelihara, menjaga dan merawat (aktif), mengusahakan, serta ada kaitan pula dengan mengusut dan menyelidiki. Membela berkaitan dengan menjaga baik-baik, memelihara dan merawat, serta melepaskan dari bahaya.

MENGANTI KATA "KONFLIK" ATAU "KERUSUHAN".

Ada baiknya bagi penulis untuk mengawali bagian tulisan ini dengan menyampaikan bahwa apabila dihubungkan dengan paradigma atau pandangan publik, maka sahabat bagi proses perdamaian di Maluku adalah waktu. Tidak ada solusi instan dari berbagai problematika kehidupan manusia yang sampai menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda serta adanya dampak traumatis yang menyusul kemudian. Namun waktu yang ada harus diisi dengan proses penyembuhan serta pemulihan.

Bagi para ahli dan pengamat proses perdamaian dan resolusi konflik, tentunya disadari bahwa perdamaian adalah suatu proses. Konflik Maluku telah selesai hampir 20 tahun yang lalu, dan karenanya memang proses perdamaian terkait konflik horisontal yang terjadi di sana haruslah sudah memasuki tahapan yang lebih dari sekedar menghentikan konflik.

Kini saatnya konsep berpikir tentang bagaimana menyelesaikan konflik berganti dengan bagaimana mempertahankan perdamaian. Bahkan lebih dari itu, harus dibawa ke dalam alam berpikir bagaimana membangun wilayah dan mengembangkan kualitas hidup manusia yang tinggal di dalamnya.

Dengan kata lain, dalam konteks proses perdamaian dan resolusi konflik, konsep ideal yang harus terbangun adalah bahwa ketika menyebut kata 'konflik' atau 'kerusuhan' maka sebaiknya penutur kata-kata tersebut sedang berbicara mengenai

pembelajaran sejarah, politik, dan atau hukum. Rentang 20 tahun di era informasi dirasakan cukup untuk mengganti kata-kata tersebut dengan 'membangun' dan 'mengembangkan'. Hanya dengan begitu maka prinsip Damai dan Resolusi Konflik (DRK) menjadi lebih bermakna.

Lebih lanjut mengenai hal ini, beberapa narasumber yang tampil menjadi pembicara dalam Sarasehan Nasional beberapa waktu lalu itu menyampaikan, bahwa masih ada sebagian publik yang ketika mendengar kata 'Maluku' kemudian mempertanyakan situasi keamanan di sana. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma berpikir sebagian masyarakat masih terperangkap dalam Maluku sebagai area konflik.

Hal ini, bagi para peneliti bahasa dan sejarah, dapat dilihat sebagai bagaimana terperangkapnya pola pikir masyarakat ke dalam suatu *stereotype* cara berpikir yang dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya, menurut dugaan penulis, adalah kurangnya kampanye dan publikasi mengenai tahapan proses perdamaian yang sedang terjadi di Maluku.

Penulis sendiri menyadari, tidak mudah merubah pola pikir atau pandangan publik. Jalan satu-satunya untuk bisa berangsur-angsur menjadikan kata 'Maluku' dihubungkan dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan konflik, melainkan dengan kemajuan, adalah dengan terus bekerja dengan hati, dan ditunjang oleh profesionalisme serta tanggung jawab baik pemerintah maupun masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat adalah tidak hanya masyarakat lokal namun juga seluruh komponen masyarakat.

KETERLIBATAN MASYARAKAT LOKAL

Dalam pendekatan damai dan resolusi konflik, kata-kata *peace-making*, *peace-keeping*, *peace-building*, dan *peace-enforcement* mengandung makna-makna yang berbeda. Selain berbeda dari sisi peran para pemangku kepentingan, juga berbeda dari sisi kurun waktu dan intensitas pelibatan manusia dalam proses.

Menarik misalnya jika mendalami beberapa analisa dan temuan para ahli di bidang hukum, dan resolusi konflik, yang menemukan pentingnya peran masyarakat lokal. Gabriela Monica Lucuta, misalnya, menekankan pentingnya menciptakan generasi baru yang jauh dari konflik melalui pelaksanaan secara benar berbagai tahapan dalam proses perdamaian. Dalam melakukan studi terhadap berbagai strategi perdamaian yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk yang terkait dengan apa yang tertulis di dalam Piagam PBB, Lucuta menyatakan bahwa perlunya peran masyarakat lokal di area konflik secara signifikan.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa memang diperlukan adanya penciptaan pemerintahan yang stabil dan berwibawa, namun proses pembangunan

perdamaian harusnya bersifat induktif. Hal ini berarti bahwa pada akhirnya, setiap persoalan dan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat harus menjadi perhatian. Mengingat masyarakat lokal yang paling memahami apa yang terjadi maka adalah penting untuk pemerintah atau pihak pemberi bantuan untuk tidak mendominasi serta memberikan patokan umum mutlak yang harus diikuti oleh semua pemangku kepentingan dilapangan. Konsep patronase harus digantikan dengan konsep kemitraan, antara masyarakat lokal dengan berbagai pihak yang ada. Di tahapan ini kebutuhan masyarakat menjadi hal utama.

Di Maluku, tahapan *peace-making*, dan *peace-keeping* tentunya telah berhasil dilalui oleh karena besarnya kasih Tuhan terhadap rakyat Maluku dan bangsa Indonesia. Penghentian pertikaian bersenjata hingga pada pendekatan-pendekatan persuasif terhadap para pihak yang terlibat di lapangan telah terjadi. Selanjutnya proses rekonsiliasi sudah menunjukkan hasil.

Adalah suatu hal yang indah, sekaligus mengharukan, ketika menyaksikan para narasumber dari berbagai latar belakang dapat berkumpul bersama dalam forum seperti Sarasehan Nasional Wantannas tentang Merawat Perdamaian tersebut. Yang menarik adalah jika ditinjau dari sisi latar belakang nara sumber, sarasehan ini berhasil menunjukkan pendekatan yang benar di dalam upaya merawat perdamaian. Komposisi peserta yang hadir tidak hanya terbatas pada para pelaku lapangan saat konflik, namun juga telah sampai pada menghadirkan pula pihak-pihak yang tergolong ilmuwan, tenaga penggerak pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya

Pelibatan masyarakat tentunya berbeda dalam setiap tahapan proses perdamaian. Sebagian dari narasumber maupun para undangan yang hadir dalam sarasehan ini adalah mereka yang juga terlibat dalam berbagai tahapan proses perdamaian. Hal itu meliputi pihak-pihak yang hadir di tahap awal pengentian konflik dan upaya penciptaan perdamaian, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ketika itu menjadi salah seorang penggerak Pertemuan Malino, hingga kalangan aktivis kemanusiaan dan akademisi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses rekonsiliasi dan rekonstruksi sosial serta penguatan politik di Maluku.

Pendekatan yang didengungkan dalam sarasehan ini, sebagai suatu cara untuk membangun masyarakat dari sisi perekonomian, yaitu konsep *emas hijau* dan *emas biru* harus dimaknai sebagai bagian dari pelibatan masyarakat lokal secara aktif dalam tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pembangunan dan pengembangan kualitas masyarakat. Harus disadari bahwa yang menjadikan konsep emas hijau dan biru berhasil adalah adanya kerelaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalamnya.

Selain itu, kelangsungan pendekatan ekonomi ini juga berhasil karena pihak pemerintah, terutama pemerintah lokal maupun pengembangan teritorial dalam rangka pertahanan dan keamanan berhasil membaca kebutuhan masyarakat. Jika ditinjau dari sisi tema Merawat Perdamaian, apakah hal yang ditampilkan dan dibahas serta dibagikan dalam forum sarasehan telah mewakili tercapainya target pembangunan dan penguatan perdamaian.

KEBERLANJUTAN

Dalam ilmu bahasa, selain aspek morfologis, diksi, dan sintaksis, dalam arti aspek peristilahan dan pemilihan kata serta perangkaiannya dalam suatu frasa atau juga kalimat, diperlukan pula kajian ilmu pragmatisme (linguistik), serta pendekatan lain seperti sosiolinguistik, dalam mencoba melihat proses perdamaian di Maluku. Bahkan jika ditarik lebih jauh, upaya menjadikan Proses Perdamaian di Maluku sebagai model proses perdamaian yang dapat diterapkan di Indonesia melibatkan pula hal-hal yang lebih luas, bahkan mungkin melampaui ilmu bahasa itu sendiri. Namun setidaknya, aspek ilmu semiotika dan sebagainya menarik untuk digunakan dalam mendekati hal ini.

Pemilihan frasa 'emas hijau' dan 'emas biru' mengedepankan makna adanya sesuatu yang berharga dan berasal dari dalam diri sendiri. Maluku, yang sebagian besar wilayahnya adalah laut, namun juga mempunyai pulau-pulau yang subur, mempunyai potensi yang sangat besar. Kembali lagi, penulis tidak mengajak pembaca untuk memikirkan tentang kekayaan alam yang begitu besar yang bahkan merubah peta politik serta perekonomian dunia di era kolonialisme, karena hal-hal tersebut tentu cukup mendalam dibahas di berbagai kesempatan.

Emas sendiri adalah suatu berkat Tuhan bagi manusia, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan manusia melalui pemanfaatan emas sebagai benda berharga tinggi. Sebagai salah satu mineral yang telah begitu rupa mempengaruhi manusia, emas sepanjang sejarah berulang kali merubah dan mempengaruhi interaksi antar manusia dengan sesame dan lingkungannya.

Sejak dulu, nilai emas dipersepsikan begitu tinggi sehingga selain merubah sejarah manusia di berbagai wilayah di muka bumi, emas memiliki nilai yang stabil serta cenderung terus meningkat sepanjang sejarah hingga saat ini. Hal ini berarti pula bahwa mengolah dan mengembangkan berbagai potensi dengan didasarkan pada kepemilikan akan emas tidak pernah terjadi hanya dalam kurun waktu singkat. Emas tetap mendapatkan perhatian dan perlakuan berkesinambungan dari manusia.

Hal yang sama harusnya juga terjadi pada emas hijau dan emas biru bagi masyarakat Maluku pada khususnya, serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Rakyat Maluku dihadapkan dengan peluang untuk bangkit setelah perekonomiannya terpuruk di masa konflik horisontal di akhir 1990an hingga mencapai titik terendah yang hanya bisa disamakan dengan saat awal kemerdekaan Indonesia. Rakyat Maluku harus bisa melihat serta berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan berbagai potensi yang ada padanya.

Dalam berbagai kisah tradisional, yang dituturkan dalam bahasa tana, sangat jarang dijumpai kisah atau pesan tentang betapa gersang dan sulitnya hidup di Maluku dari sisi ekonomi. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya memang wilayah ini memiliki potensi yang sangat besar. Potensi-potensi yang ada ini tidak akan pernah mengalami pengembangan hingga mendatangkan hasil apabila rakyat teralihkan perhatiannya kepada kepentingan berkonflik, pemerintah tidak mendorong pengembangan potensi yang ada, serta tidak adanya perlindungan yang cukup terhadap intervensi gangguan keamanan terhadap tatanan kerukunan dan persaudaraan di Tanah Maluku. Hanya dengan perdamaianlah potensi-potensi yang ada di darat maupun di laut Maluku dapat terkelola dan termanfaatkan. Adapun peran pemerintah menjadi penting, untuk mendorong terciptanya suasana yang terus kondusif, baik dari sisi keamanan maupun dari sisi pendampingan serta dari sisi perlindungan terhadap kekayaan Maluku.

Dalam pertimbangan sosiolinguistik, kata 'Maluku' sudah harus lebih dihubungkan dengan penuturan tentang optimisme, semangat, dan situasi yang kondusif. Sudah saatnya kata 'Maluku' tidak lagi membangkitkan *stereotype* pemikiran tentang wilayah tertinggal dan rawan. Selain itu, idealnya ialah kata 'damai' dalam konteks Maluku harus jauh dari *register* istilah atau kosakata kalangan pengembangan tugas pertahanan keamanan maupun kalangan masyarakat umum dalam kaitan dengan konflik.

Hendaknya, sejalan dengan fokus pengembangan wilayah ke depan, kata Maluku harus menjadi bagian dari makna wilayah pariwisata, dan wilayah penghasil berbagai produk dan komoditas darat maupun laut. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan nasional asal Maluku, tidak boleh ada yang mundur atau berhenti dalam memperjuangkan niat tersebut. Tentunya, sebagai provinsi yang telah merdeka sejak 17 Agustus 1945, rakyat Maluku, bangsa Indonesia, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan perjuangan ini berhasil. ****

PEMERINTAH REVISI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2018



Cuti Bersama 2018 TAMBAH 3 HARI (11, 12, dan 20 Juni)

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 223, No. 46, dan No. 13 Tahun 2018 Tanggal 18 April 2018

Pemerintah merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. Revisi khususnya berkaitan dengan penambahan cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah ditambah 3 (tiga) hari. Penambahan dilakukan pada sebelum lebaran (tanggal 11 Juni, dan 12 Juni) dan setelah lebaran (20 Juni). Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.

Salah satu pertimbangan ditambahkan cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah adalah untuk mengurai arus lalu lintas sebelum dan sesudah

masuk Lebaran, sehingga cukup waktunya bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dengan keluarganya yang ada di luar kota

Penandatanganan revisi dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Saifuddin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Asman Abnur dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan disaksikan oleh Menko PMK Puan Maharani serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Secara keseluruhan, Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2018 sebanyak 24 hari. Melalui revisi ini, cuti bersama Idul Fitri yang

secara keseluruhan, Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2018 sebanyak 24 hari, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang baru, Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018, dan Nomor 13 Tahun 2018, rincian Hari Libur Nasional sebanyak 16 hari dan Cuti Bersama sebanyak 8 hari untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah dan Hari Raya Natal.

Keputusan SKB yang mengatur tambahan cuti bersama ini berlaku untuk TNI, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pegawai swasta, dan BUMN. Sementara cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Presiden. Setiap keputusan yang diambil tentu tidak akan memuaskan semua pihak, akan tetapi apa yang diputuskan oleh pemerintah tentu telah mempertimbangkan banyak hal yang terkait dengan kebutuhan dan kondisi di masyarakat. pemerintah lebih menggaris bawahi kondisi sosial, keamanan, ketertiban dan kelancaran yang akan terjadi di periode Libur Nasional dan Cuti Bersama tersebut.

Kritik tentu saja ada atas SKB yang telah diterbitkan oleh pemerintah salah satunya datang dari organisasi yang cukup eksis yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menyebut dampak dari revisi Cuti Bersama atau Libur Lebaran yang dilakukan oleh pemerintah merugikan konsumen, terutama bagi yang sudah terlanjur membeli tiket.

Revisi Hari Libur Lebaran sebenarnya bisa dipahami. Namun, pembatalan Libur Lebaran yang sebelumnya ditetapkan dalam SKB tiga Menteri menunjukkan pemerintah sangat lemah dalam proses penggodokan kebijakan publik

Sementara, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, kebijakan ini menimbulkan keresahan bagi kalangan pengusaha. Kebijakan penambahan cuti bersama Lebaran dari empat hari menjadi tujuh hari tersebut akan mengurangi beberapa hal penting dalam dunia usaha.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, sejumlah pihak sudah dimintai masukan terkait akan

direvisi kembali aturan Cuti Bersama Lebaran yang sebelumnya telah ditetapkan dalam SKB tiga Menteri. Selain kalangan pengusaha, pemerintah juga meminta masukan dari lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Melihat sebuah kebijakan memang tidak bisa dinilai dari satu sudut saja, kebijakan pemerintah yang merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2018, menggunakan banyak pertimbangan, masukan dan komunikasi dengan banyak pihak adalah satu cara yang paling baik. kita



Foto: Internet

akan mengapresiasi kebijakan ini jika nanti memberi efek positif bagi masyarakat, yang jelas bangsa Indonesia bukan bangsa pemalas yang begitu senang ketika diberikan libur yang panjang, akan tetapi mampu berperilaku produktif disemua kesempatan dan waktu sekalipun itu adalah libur yang panjang.

Masyarakat dan semua kalangan yang berkepentingan dan menjadi pemerhati tentu memiliki niat yang baik pula, menjadi tugas kita bersama untuk terus kritis terhadap setiap keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, akan lebih arif pula jika kita menilai kebijakan pemerintah ini setelah masyarakat menjalani kebijakan itu. Tujuannya, agar dalam mengevaluasi dan memberi masukan yang nyata, bukan berdasarkan prediksi dan prasangka saja. Alangkah baiknya setiap kebijakan pemerintah kita sikapi dengan baik sangka dan tetap berpikir konstruktif dalam kritis.****(dfn)



SEMANGAT NAWACITA JADI INSPIRASI LETJEN TNI DONI MONARDO UNTUK SELENGGARAKAN LATIHAN SIMULASI INSIDEN SIBER

Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo membuka Latihan Simulasi Insiden Siber pada Selasa (24/07/2018) di Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Acara ini merupakan hasil kerja sama antara Setjen Wantannas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS), sebuah lembaga dari Jerman yang sudah cukup lama berkolaborasi di berbagai bidang dengan Indonesia. Tujuan kegiatan ini sendiri tidak lain untuk mempersiapkan koordinasi dan pengambilan keputusan yang efektif antarlembaga dalam mengantisipasi insiden siber pada obyek vital nasional.

Ide dari semangat nawacita Presiden RI periode 2014-2019 menjadi inspirasi terselenggaranya perhelatan ini. "Nawacita sebagai rujukan menghadapi ancaman serangan siber yang tertuang dalam butir keempat yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara," terang Doni Monardo.

Namun, memasuki dekade kedua abad 21, digitalisasi sudah merambah ke setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga ke pengelolaan negara. Aspek positif dari kemajuan teknologi tersebut harus dipertahankan. "Kehadiran telekomunikasi digital telah menjadikan dunia dapat diakses dalam satu tombol dan memungkinkan manusia berkembang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Aspek positif dari kemajuan teknologi tersebut harus

dipertahankan dan ditingkatkan secara lebih merata di seluruh wilayah NKRI untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," terangnya lagi.

Namun, lanjut Sesjen, keterlibatan bangsa Indonesia di era digital saat ini juga berpeluang meningkatnya ancaman di era digital berupa keamanan informasi dan *cyber security*, dimana kedua faktor ini menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Selain itu, *Cyber security* juga ditujukan guna mendukung nawacita dalam mengamankan sektor strategis nasional, kepentingan nasional, dan masyarakat.

Kewaspadaan terhadap ancaman siber perlu dilaksanakan pada semua aspek kehidupan masyarakat. Serangan yang terjadi dapat berlangsung secara frontal dan nyata, namun juga dapat berlangsung secara terselubung seperti maraknya berita hoax, ujaran kebencian, penyebaran virus komputer, kejahatan perbankan, penyebaran ideologi radikal, rekrutmen kelompok teror, pencurian data komputer, propaganda negatif dan sebagainya.

Doni Monardo berharap, *output* yang dihasilkan dari kegiatan ini bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ditegaskan olehnya, masalah akan selalu ada, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mencari solusi dari permasalahan tersebut dan menghadapinya dengan baik termasuk bagaimana mengantisipasi datangnya serangan siber terhadap instalasi kritis nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia.

RAPAT KOORDINASI PRA KEGIATAN

Jumat (20/07/2018) Doni Monardo selaku pimpinan tertinggi Setjen Wantannas menggelar Rapat Koordinasi Latihan Simulasi Insiden Siber yang bertempat di ruang *Situation Room* Lantai 5 Kantor Setjen Wantannas. Sekaligus dalam rapat ini disusun rencana perjanjian kerja sama antara Setjen Wantannas dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI serta Konrad Adenauer Stiftung.

Mantan pemimpin tertinggi Kodam III Siliwangi ini berpendapat bahwa, latihan siber ini relatif baru dan jarang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi, tidak seperti layaknya latihan bencana alam. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Akan tetapi, merupakan suatu tuntutan dinamika perkembangan zaman. Mau diterima atau tidak, kehidupan atau masa depan dunia ini, nantinya akan ditentukan oleh perkembangan IT.

“Jika kita jeli melihat, masa depan kita dan kehidupan kita nantinya akan sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi IT atau siber, dan sekarang ini, ruang kosong penggunaan teknologi informasi belum ada aturan yang mengatur secara global dan menyeluruh,” urai Sesjen.

Lebih lanjut disampaikan Doni Monardo, jika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi, dan terus menerus terpana pada urusan domestik dan politik kekuasaan yang selalu saling menyalahkan, kapan kita akan bersatu, kapan kita bisa membangun, kapan kita memiliki kemampuan

untuk berkompetisi, dan kapan kita bisa menghadapi perubahan yang begitu cepat.

Dari simulasi ini diharapkan bisa memperkuat kita untuk mendapatkan gambaran apa yang harus dilakukan apabila suatu saat nanti ada serangan insiden siber yang menimpa negeri tercinta. Oleh karenanya, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita bisa bersatu mempersiapkan diri untuk betul-betul menghadapi dengan sebuah sistem. Seyogyanya perlu ada pembekalan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai siber itu sendiri.

Sejauh ini, masih menurut Doni Monardo, yang paling menguasai teknologi siber adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Diharapkan BSSN bisa menjadi pelopor dan penjuror agar sistem pertahanan siber kita semakin baik.

Jika ditinjau dari tingkat urgensi, Latihan Simulasi Insiden Siber ada baiknya melibatkan sejumlah tokoh-tokoh muda yang memiliki *followers* di dunia maya, sehingga pemberitaan-pemberitaan yang ada kaitannya dengan kegiatan ini bisa di viralkan secara massif dengan harapan mampu membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia khususnya generasi muda agar memanfaatkan segala bentuk teknologi hanya untuk kepentingan bangsa. Jangan seperti sekarang ini, dimana teknologi selain digunakan untuk kebaikan, juga disalahgunakan untuk saling menyalahkan, menerima berita-berita negatif, ataupun memposting segala sesuatu yang tidak sewajarnya tanpa perasaan bersalah. ****(dfn)





WAPRES JK UNGKAP FAKTA KONFLIK DI MALUKU PADA ACARA SARASEHAN NASIONAL

Setjen Wantannas setelah melalui proses yang amat panjang, akhirnya dengan sukses berhasil menyelenggarakan perhelatan akbar bertajuk Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku & Maluku Utara untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Acara tersebut berlangsung sejak Selasa (10/7/2018) hingga Rabu (11/7/2018) di Hotel JS Luwansa Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

PERSATUAN ADALAH SATU KATA KUNCI

Acara yang semula direncanakan akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, pada akhirnya diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Jenderal TNI (Purn) Wiranto di hari pertama. "Saya diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk membuka acara Sarasehan. Sebagai Menko Polhukam, saya memang ada sangkut pautnya dengan masalah perdamaian dan persatuan. Juga mungkin Presiden melihat kalau saya pernah melakukan banyak hal pada saat menjabat Menhankamgab dulu termasuk menyampaikan konflik di Maluku pada awal-awal terjadi konflik di sana tahun 1999," ucap Wiranto.

Presiden Jokowi berpesan, lanjut Wiranto, acara Sarasehan ini harus benar-benar dapat menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan masukan

kepada Presiden, khususnya yang terkait dengan bagaimana nantinya kita melakukan banyak hal dalam merawat perdamaian yang 'mahal harganya' ini.

Lebih dalam lagi Wiranto mengatakan, merawat perdamaian adalah suatu keniscayaan. Sebab, perdamaian berlawanan kata dengan peperangan. Tidak pernah ada dalam satu negara manapun, sambil berperang, sambil berkonflik, dapat membangun bangsa.

Wiranto sendiri mengatakan, pemilihan tema Sarasehan sangat sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 khususnya pada alinea kedua yaitu "kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Oleh sebab itu, apabila kita ingin mendapatkan cita-cita nasional, syarat utamanya adalah bersatu. Dengan bersatu, kita bisa berdaulat.

Dengan berdaulat, kita bisa mandiri sebagai bangsa. Dengan mandiri, kita bisa ciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sekali lagi bukan dengan peperangan atau dengan konflik.

Mengakhiri kata sambutannya, Wiranto meningkatkan kita semua tentang pentingnya persatuan. Persatuan adalah satu kata kunci, bahwa negeri ini hanya bisa mewujudkan cita-citanya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, harus dengan satu cara yaitu giat mempersatukan potensi bangsa dan negeri kita.

KONFLIK DI MALUKU BUKANLAH KONFLIK AGAMA

Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) hadir sebagai Pembicara Utama dalam perhelatan Sarasehan Nasional di hari pertama. Dikatakan dalam pidatonya, tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk mempelajari kembali masalah konflik Maluku untuk menjadi bagian dari upaya kita ke depan bagaimana agar negeri ini tetap bersatu. "Apabila kita berbicara tentang konflik Maluku, banyak orang mengira bahwa itu adalah konflik agama, walaupun pada akhirnya adalah memang konflik agama. Akan tetapi, penyebabnya adalah bukan masalah agama. Perlu diketahui, kehidupan beragama di Maluku sangat baik," kata Wapres.

JK menambahkan, jika kita runut ke

belakang, ada dua masalah pokok penyebab konflik di sana yaitu masalah ekonomi dan politik. Untuk masalah ekonomi, rakyat Maluku sangat tergantung pada hasil laut dan rempah-rempah terutama cengkeh.

Lebih dalam JK menuturkan, tahun 1992, nilai ekonomis tanaman cengkeh amat sangat besar, sehingga penguasa pada waktu itu (Presiden Soeharto), menerapkan satu kebijakan yang dinamakan 'Hongi Gaya Baru' (monopoli perdagangan cengkeh dalam negeri) melalui pendirian Badan Penyanggah dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang ternyata sangat merugikan petani.

Kategori merugikan yang dimaksud yaitu harga cengkeh yang diterima petani anjlok sampai hanya Rp 4.000.- per kg, walaupun harga dipasar menembus kisaran Rp. 10.000.-. Sangat jauh lebih murah dari harga sebungkus kretek yang dihasilkan darinya. Hal ini pun menimbulkan penurunan pendapatan pada masyarakat.

Sedangkan Pemicu konflik lainnya, lanjut JK, yaitu masalah politik yang timbul berbarengan dengan dimulainya gelombang reformasi, tepatnya pada 1998. Saat itu, runtuhnya rezim Orde Baru diikuti dengan dibubarkannya BPPC. Secara perlahan tapi pasti, harga cengkeh kembali merangkak naik, bahkan melewati angka Rp 200.000 per kg pada 2012.

Di sisi lain, sistem demokrasi yang tiba-tiba terbuka, menyebabkan terjadinya pergeseran pada sistem pemerintahan yang bersumber pada *the winner take off*. Ujung-ujungnya terjadi ketidakarmonisan pada sistem pemerintahan. Maluku yang waktu itu masih bergabung dengan Maluku Utara, penduduk muslimnya lebih banyak, sehingga 'kursi-kursi' di DPRD tentunya tidak seimbang. "Kesalahannya ialah karena politik. Terjadilah kemudian Gubernur, Sekda, Ketua DPR semua muslim. Wagubnya orang Katolik sehingga terjadilah ketidakseimbangan ekonomi dan politik di masyarakat. Padahal sebelumnya tidak seperti itu," papar Wapres.

Keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh

oknum-oknum yang mengatasnamakan agama sehingga konflik besar pun terjadi. Awal konflik sebenarnya tertuju pada anak muda. Kemudian bergeser menjadi isu ras dengan target sasaran Komunitas Bugis Makassar (KBM), yang berdampak pada terjadinya evakuasi besar-besaran. Tidak perlu waktu lama, tragedi itu berubah menjadi isu agama setelah masing-masing yang bertikai berpihak kepada agamanya sendiri-sendiri.

Wapres RI ke-12 Ini kembali menyampaikan keprihatinannya dengan yang terjadi saat itu. "Mengapa isu agama menjadi sangat mudah? Karena jika orang berperang atas nama agama, pasti tidak ada yang netral. Hal ini menjadi lebih parah ketika para pemuka agama di kedua belah pihak memberikan doktrinisasi, kalau s a l i n g membunuh atau m e m b a k a r tempat ibadah, itu masuk s u r g a , " paparnya lagi. Dampaknya, Timbul konflik yang lebih besar lagi karena alasan 'masuk surga'.

Kesimpulan dari semua ini adalah awal terjadinya demokrasi di Indonesia memakan korban jiwa hingga ribuan jumlahnya yang diakibatkan dari demokrasi yang dipraktekan oleh *the winner take off*. Namun, saat ini sudah tidak terjadi lagi, karena demokrasi sudah harmonis dan semuanya sudah terharmonisasi.

Sarasehan Nasional Setjen Wantannas dihadiri oleh sekitar 500 orang undangan yang berasal dari masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang terlibat dalam resolusi konflik dan damai di Kepulauan Maluku, perwakilan dari daerah-daerah yang rawan konflik seperti Aceh, Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan wilayah lainnya. hadir pula pejabat Kementerian/Lembaga yang berasal dari TNI/Polri, perwakilan kedutaan besar negara sahabat, pejabat daerah (pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota), siswa lembaga pendidikan baik sipil maupun militer, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa, dan masyarakat umum.****(dfn)



Wapres RI Jusuf Kalla hadir sebagai Pembicara Utama dalam Sarasehan Nasional Setjen Wantannas



LETJEN TNI DONI MONARDO UPA UNTUK NARAPIDANA ASAL MALU

Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo yang pernah menjabat Pangdam III/Siliwangi baru saja selesai menggelar Sarasehan Nasional selama 2 hari. Terselenggaranya acara tersebut tidak lain merupakan salah satu bentuk kepedulian Doni Monardo terhadap warga Maluku.

Tidak hanya itu, ia pun menindaklanjuti keinginan beberapa warga Maluku tersebut yang berharap bisa mendapatkan pengampunan terhadap hukuman dari pemerintah (grasi) untuk anggota keluarganya yang menjadi narapidana (napi) di Nusakambangan karena terlibat gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) sebuah gerakan separatis di Indonesia dan Cakalele (gerakan protes melawan sistem pemerintahan yang dianggap tidak memihak pada rakyat).

Untuk itu, pada Kamis (12/07/2018), Doni Monardo beserta beberapa Pejabat Eselon I dan II serta warga Maluku yang merupakan saksi sejarah mengadakan pertemuan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamongon Laoly. Rombongan tiba pukul 15.00 WIB dan diterima langsung oleh Menkumham.

Sebagai pembuka dialog, Sesjen

Wantannas ke-14 ini secara singkat menyampaikan, Setjen Wantannas telah dengan sukses menyelenggarakan Sarasehan Nasional selama 2 hari. "Kemarin, 2 hari yang lalu, kami baru saja menggelar acara Sarasehan dengan tema Merawat Perdamaian di Maluku yang dibuka oleh Menko Polhukam Wiranto. Kami juga mendatangkan Wapres Jusuf Kalla yang dulunya pernah menggagas Malino 2," kata Doni Monardo.

Acara Sarasehan, lanjut Doni Monardo, mengundang 125 orang Maluku yang merupakan saksi sejarah atas konflik yang terjadi disana. Sejumlah dari mereka berasal dari desa Aboru, desa yang dikenal sebagai basis kelompok separatis RMS dan warganya juga merupakan pelaku penari Cakalele, tarian yang dulu dimainkan oleh sejumlah warga Aboru dalam sebuah acara yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007 silam sambil mengibarkan bendera RMS.

Sampai saat ini, ada 26 orang pelaku RMS yang masih dipenjarakan. Dari 26 orang tersebut, 6 orang diantaranya adalah saudara kandung. Sedangkan 4 orang diantaranya sudah bebas dari penjara. Sedangkan di wilayah lain yaitu Nusakambangan, masih ada 4 orang napi, juga di



AYAKAN GRASI MALUKU

Walu ada 2 orang terpidana, salah satunya meninggal dunia karena serangan jantung.

Doni Monardo pun membeberkan alasannya ingin membantu wilayah dari bagian Indonesia yang memberotak ini. Paling utama adalah rasa perikemanusiaan. "Dari 2 tahun yang lalu, saya merasa kasihan terhadap wilayah Maluku, karena Maluku adalah 'negeri' kecil yang terisolir serta 'dihukum' oleh seluruh komponen yang ada sejak peristiwa RMS. Kenapa dihukum? Kemungkinan besar karena adanya kecemburuan," jelas Doni Monardo. Oleh sebab itu, Doni Monardo bersama Kodam Brawijaya bekerja sama memberikan bantuan financial kepada daerah-daerah di Maluku yang masih terjadi pergolakan.

Kepada Menkumham, Doni Monardo menceritakan secara singkat sejarah yang pernah ia pelajari tentang Maluku. "Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Maluku adalah orang yang banyak mendapat 'tempat', sehingga mayoritas dari mereka berprofesi sebagai kenil. Rakyat Maluku adalah bangsa yang setia dan berani, sehingga mendapat kepercayaan dari Belanda. Bahkan, pada saat Belanda keluar dari Indonesia, banyak warga Maluku yang ikut ke Belanda. Sampai sekarang, ada sekitar 60 ribu warga Belanda keturunan Maluku

yang tinggal disana," terang Doni Monardo.

Diluar itu, ada hal menarik tentang warga Maluku yang diungkap oleh Doni Monardo. Menurutnya, warga Maluku memiliki jiwa sportif dan apa adanya dalam berbicara. Sehingga, perlu diwaspadai bagi yang tidak terbiasa menerima kritikan, kebiasaan ini akan membuat 'pedas' telinga.

Adapun pengalaman lain yang masih melekat dalam ingatan Doni Monardo yaitu ketika 2 tahun silam, tepatnya tanggal 17 Agustus 2016. Saat itu, ada usulan dari Menteri BUMN Rini Soemarno untuk merayakan kemerdekaan di Ambon sekaligus membantu korban veteran. Lantas, ia pun menyarankan agar acara tersebut diselenggarakan di Desa Aboru.

Pualu Aboru sendiri merupakan kelahiran dari Johannes Latuharhary, seorang tokoh penentu apakah Ambon mau bergabung atau tidak dengan Indonesia. Pada waktu itu, tanpa Johannes Latuharhary, Maluku bukan bagian dari Indonesia. Maluku sendiri merupakan provinsi pertama dari 8 provinsi yang memproklamkan keinginannya untuk bergabung dengan Indonesia.

Singkat cerita, kedatangan Menteri Rini yang tanpa disangka-sangka, mendapat sambutan yang hangat dari warga Ambon. dan moment ini dijadikan catatan sejarah, yaitu untuk pertama kalinya ada Menteri Indonesia yang merayakan kemerdekaan di negeri Ambon. Lagi-lagi, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran serta keterlibatan Doni Monardo.

Dialog bersama Menteri Yasonna Laoly dijadikan kesempatan oleh Doni Monardo untuk menyampaikan keinginannya membantu keluarga dari keenam napi agar mereka mau menerima grasi pada bulan Agustus nanti. Perlu diketahui, para napi tersebut menolak untuk diberikan grasi dan lebih menginginkan amnesti serta rehabilitasi. Sementara, dari pihak keluarga, berharap mereka memperoleh grasi. Oleh sebab itu, Doni Monardo bermaksud menjembati mereka dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Bak gayung bersambut, Menkumham merespon cepat keinginan Doni Monardo dengan menunjuk stafnya yang bertugas di Pulau Nusakambangan untuk mendampingi dan memfasilitasi warga Maluku tersebut. Begitu pedulinya Jenderal bertubuh tinggi ramping ini terhadap warga Maluku. Karena ia berpinsip, kita semua adalah saudara. Tidak masalah apapun suku dan agamanya.

Doni Monardo sendiri sudah menyambangi Maluku sebanyak enam kali, dimana pada awal kedatangannya, ia menggunakan strategi kepedulian terhadap kesehatan, salah satunya dengan mengirimkan tim medis ke Maluku. ****(dfn)



CITY TOUR, MERAWAT PERDAMAIAN MEMPERERAT KEAKRABAN

Selepas perhelatan akbar Sarasehan Nasional yang berlangsung selama dua hari pada 10-11 Juli 2018, warga Maluku yang hadir sebagai peserta, berkesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata dan bersejarah yang ada di Jakarta dan Bogor.

Di hari pertama, obyek wisata yang dikunjungi adalah daerah Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengalaman pertama yang berkesan adalah kondisi alam yang cukup ekstrem dan berbanding terbalik dengan alam di Maluku yang lumayan panas. Target utama kunjungan mereka di sana adalah Taman Safari Indonesia yang terletak di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua, dan merupakan tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan serta berorientasi pada habitat satwa di alam bebas.

Tempat wisata lain yang menjadi kunjungan mereka yaitu Sentra Kerajinan Indonesia (SKI) yang berlokasi di Tajur, Bogor. Sejak tahun 2000, Jalan Raya Tajur, Bogor, Jawa Barat menjelma sebagai sentra penjualan tas. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini semakin kesohor dengan sebutan sentra tas Tajur. Total terdapat sekitar sebelas toko yang menjual aneka tas di daerah ini.

Museum Kepresidenan Bogor menjadi kunjungan ketiga peserta *City Tour*. Museum ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada para Presiden Indonesia. Selain itu, Museum ini juga diharapkan menjadi tempat wisata edukasi bagi anak-anak.

Museum ini diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 18 Oktober 2014, dua hari sebelum berakhir masa jabatannya. Yang tentunya paling menarik dari Museum ini yaitu berdirinya patung Presiden SBY sebagai pendiri museum serta patung lima orang

Presiden RI sebelumnya yaitu Ir. Soekarno, H.M. Soeharto, Prof. Dr. B. J. Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri.

Di hari kedua, Jakarta menjadi target kunjungan. Salah satu destinasiya adalah Monumen Nasional atau Monas, kawasan Tanah Abang, dan Thamrin City. Tidak ketinggalan Masjid Istiqlal turut menjadi bagian. Kunjungan ke masjid dibangun pada 24 Agustus 1961 ini disambut baik oleh Imam Besar Nasaruddin Umar. Sementara, kerukunan antar umat beragama di Indonesia menjadi topik menarik yang diperbincangkan di sana.

Menjelang makan siang, warga Maluku ini mengunjungi Gereja Katedral yang terletak persis bersebelahan dengan Masjid Istiqlal. Sejarah mengenai berdirinya tempat ibadah tersebut dan kerukunan beragama yang selama ini dirawat oleh umat Nasrani menjadi perbincangan yang hangat selama berada di sana.

Yang tak kalah menariknya adalah mengunjungi Gereja Imanuel yang terletak tidak jauh dari Gereja Katedral. Tempat beribadah umat Nasrani ini merupakan bangunan bersejarah dengan usia lebih dari dua abad. Sejak didirikan, Gereja Imanuel belum pernah direnovasi. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Gereja Imanuel sebagai cagar budaya.

Kunjungan ke Gereja Imanuel merupakan rangkaian akhir *City Tour* yang diinisiasi Letjen TNI Doni Monardo. Mari kita lihat sisi positif dari kegiatan ini. Setidaknya Doni Monardo berupaya memberi contoh kepada kita semua bahwa kepedulian terhadap sesama bisa dilakukan oleh dan untuk siapa saja, juga dimana saja. Menciptakan perdamaian adalah hal yang mudah. Namun, merawatnya, tidaklah semudah yang kita ucapkan. Awalilah dari diri sendiri sebagai sebuah langkah yang indah.****(yr)

“Indonesia menjadi salah satu negara penghasil rempah terbesar dunia yang sejak dulu menjadi komoditi berharga di seluruh dunia. Selain seni dan budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan alam berupa rempah-rempah yang beragam jenisnya. Keragaman rempah-rempah inilah yang menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia,” demikian cuplikan sambutan Letjen TNI Doni Monardo dalam rapat membahas tentang kejayaan rempah-rempah Indonesia beberapa waktu lalu.

Mengulas balik sejarah, pada era sebelum Masehi pun, rempah-rempah sudah digunakan oleh bangsa Mesir kuno jauh sebelum bangsa Eropa menjajah Nusantara pada abad ke-16. Saat itu bangsa Mesir Kuno menggunakan kayu manis, merica, dan cengkeh untuk mengawetkan mumi raja-raja Mesir. Rempah-rempah juga digunakan sebagai bumbu dalam meracik masakan, membuat parfum, dan kebutuhan lainnya.

Rempah-rempah jugalah yang menarik perhatian bangsa Portugis untuk datang menjajah dan menguasai rempah-rempah yang saat itu ditemukan di Maluku. Sepanjang abad 16 dan 17, bangsa Portugis dan Spanyol memperebutkan penguasaan tanah rempah-rempah di Maluku, disusul oleh bangsa Belanda di abad ke-17.

Rempah-rempah merupakan barang komoditi yang utama dan paling berharga saat itu. Harga jual cengkeh hampir sama dengan harga emas batangan. Oleh karena itu, Setjen Wantannas di bawah kepemimpinan Doni Monardo merasa perlu mendukung segala upaya untuk kembali menjadikan rempah-rempah sebagai komoditi andalan Indonesia.

Salah satu bentuk upaya itu menurut pendapat Doni Monardo adalah dengan mengelola secara baik kekayaan rempah-rempah di Indonesia, yang mana bisa menjadi penyumbang devisa terbesar untuk negara. apabila dikelola dengan baik akan bisa menyumbang devisa yang sangat besar untuk negara, seperti halnya perusahaan-

perusahaan raksasa dunia seperti Microsoft, Google, Facebook, Freeport yang belum bisa menandingi kekayaan *Verenigde Oostindische Compagnie* atau VOC yang pernah berkuasa di Nusantara selama hampir tiga abad. “Kita semua takjub dengan VOC, seluruh perusahaan besar dunia yang ada saat ini seperti Facebook, Google, Amazone, Microsoft, dan dua puluh perusahaan besar lainnya apabila digabungkan, baru bisa menyamai kekayaan VOC”, ujar Doni Monardo dihadapan para peserta yang hadir.

Doni Monardo menambahkan dengan mengatakan bahwa produk-produk perkebunan Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain seperti Gaharu, Masoya, Cendana, dan lain-lain



yang nyaris hilang dari peredaran bisa menjadi komoditi andalan Indonesia. “Seperti masoya yang hari ini menjadi bahan parfum produk Hermes yang menjadi *trending* di luar negeri dan penjualannya bisa habis dalam waktu kurang dari sebulan”, jelas Doni Monardo.

Dalam pembahasan rempah-rempah ini, Doni Monardo mengundang Bupati Kabupaten Pidie Jaya Daerah Istimewa Aceh H. Aiyub Abbas, Wali Kota Langsa Daerah Istimewa Aceh Ir. Usman Abdullah, Ketua Umum DPPPT HAKTI Rina Sa'adah Lc, M.Si, Presiden Direktur PT. Santos Jaya Abadi Soedomo Margonoto, para Danrem dan Dandim Daerah Istimewa Aceh serta diaspora Indonesia yang menetap di negara Belanda.****(yr)



FAKTA UNIK DAN MENARIK SEPUTAR ASIAN GAMES

Gelaran Asian Games XVIII tahun 2018 tinggal menghitung hari, berbagai upaya dan persiapan maksimal telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah yang baik. Jakarta dan Palembang menjadi kota yang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah pada pertemuan tanggal 19 September 2014 lalu setelah pengunduran diri Vietnam sebagai tuan rumah.

18-08-2018 Pembukaan Asian Games akan dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Namun tahukah anda sejarah dan serba-serbi Asian Games yang pertama kali diadakan pada tahun 1951 di New Delhi, India, Berikut beberapa fakta unik dan menarik tentang Asian Games :

- Pada Asian Games VI tahun 1970, Thailand menjadi tuan rumah dengan pendanaan Korea selatan yang batal menjadi tuan rumah Asian Games karena terjadi krisis dengan Korea Utara. Pada Asian Games ini pula pertama kalinya pertandingan Asian Games disiarkan langsung ke seluruh dunia via televisi.
- Demi Menghormati negara-negara Arab dan RRC, Indonesia tidak mengundang Israel dan Taiwan di Asian Games IV tahun 1962, Namun sebagai akibatnya, Indonesia dikeluarkan dari keanggotaan Komite Olimpiade Internasional.
- Asian Games VII tahun 1974 merupakan keikutsertaan terakhir Israel di ajang Asian Games.
- Hanya ada 7 negara yang tidak pernah absen dalam ajang Asian Games yakni Indonesia, India, Jepang, Filipina, Sri Lanka, Singapura, dan Thailand.
- Mulai Asian Games XIII (1998) di Bangkok Thailand, salah satu sponsor resmi Asian Games menobatkan *Most Valuable Player* (MVP) dari seluruh atlet yang berpartisipasi.
- Total ada 46 negara yang pernah mengikuti ajang Asian Games termasuk Israel sebelum keikutsertaan terakhirnya tahun 1974.
- Pada Asian Games VIII (1978) Singapura

mundur sebagai tuan rumah karena masalah finansial, dan uniknya Pakistan yang ditunjuk sebagai penggantinya juga mengundurkan diri. Sebagai gantinya, Thailand lagi-lagi menjadi tuan rumah Asian Games untuk yang ketiga kalinya.

- Asian Games IX (1982) menjadi ajang Asian Games pertama yang digelar dibawah Dewan Olimpiade Asia (dibawah IOC) sebagai pengganti federasi Asian Games. Pada Asian Games ini juga pertandingan disiarkan ke seluruh dunia lewat TV berwarna.
- Setelah absen sebanyak 4 kali (1974, 1978, 1982, dan 1986) Taiwan kembali berkompetisi dengan nama China Taipei pada Asian Games XI (1990)
- Asian Games XII (1994) untuk pertama kalinya diikuti negara-negara pecahan Uni Soviet yaitu Kazakhstan, Kyrgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Sementara itu Irak absen karena terlibat perang teluk, dan Korea Utara tidak berpartisipasi akibat adanya alasan politik. Asian Games ini juga untuk pertama kalinya diadakan bukan di ibukota negara tuan rumah yakni di Hiroshima Jepang.
- Asian Games XIII (1998) untuk keempat kalinya Bangkok menjadi tuan rumah. Dan ini merupakan rekor penyelenggaraan terbanyak ajang Asian Games.
- Dari awal penyelenggaraan Asian Games, Hanya ada dua negara yang selalu menjadi juara umum, yakni Jepang (8 kali) dan RRC (9 kali).
- Asian Games XVIII (2018) menjadi ajang Asian Games pertama yang berlangsung di dua kota yakni Jakarta dan Palembang.
- Pada ajang Asian Games XVIII (2018) ini juga ada 10 cabang olahraga baru yang dipertandingkan yaitu Rollersport (Rollerskate dan Skateboarding), Bridge, 3 on 3 Basketball, Jet Ski, Sport Climbing, Paragliding, Pencak Silat, Jiu Jitsu, Sambo, dan Kurash.****

Kamar hotel yang bersih adalah apa yang selalu didamba oleh *traveler*. Namun, ada beberapa area di kamar hotel yang diketahui paling kotor. Bagian apa saja? Sejatinya, pihak pengelola hotel selalu rutin membersihkan kamar hotel sebelum tamu datang menginap. Hanya saja, ada saja bagian tertentu dari kamar hotel yang sering luput dari perhatian petugas kebersihan hotel.

Dikumpulkan detikTravel dari berbagai sumber, Senin (19/2/2018), sebuah study pada pertemuan *American Society of Microbiology* di tahun 2012 menjelaskan kalau sekitar 81% permukaan di kamar hotel terkontaminasi oleh bakteri. Area seperti tombol lampu dan *remote* TV merupakan beberapa yang disebut paling banyak

tombol flush toilet, virus dan kotoran juga menyebar ke tembok toilet, pegangan toilet dan juga tembok kamar mandi.

Di luar toilet, permukaan karpet dan seprai kasur juga perlu diwaspadai. Pihak hotel biasanya selalu mengganti handuk dan seprai sebelum tamu datang, tapi tidak selalu untuk seprai kasur.

Selain itu, bagian lain dari kamar hotel yang perlu diperhatikan adalah gelas minum dan cangkir teh yang biasanya disediakan oleh pihak hotel. Bisa saja wadah untuk minum itu mengandung bakteri apabila tidak dibersihkan dengan baik.

Oleh sebab itu, ada baiknya *traveler* membawa membawa tissue basah yang mengandung alkohol. Fungsinya adalah untuk membersihkan area-area yang rawan bakteri



Foto: Internet

SUDAH TAHU? Ini Aneka Area Paling Kotor di Kamar Hotel

bakteri, begitu juga dengan toilet dan wastafel yang penuh bakteri berukuran mikro.

Diungkapkan oleh pakar bakteri sekaligus Profesor Kesehatan Lingkungan dari Universitas Arizona, Kelly Reynolds, bahwa fakta tersebut sama sekali tidak mengejutkan.

Alasannya, area yang paling banyak disentuh oleh tamu hotel menjadi wadah bagi bakteri berkumpul. Setiap kali Anda menyalakan *remote* atau memencet tombol lampu, bakteri dari tangan akan berpindah ke objek lain. Contohnya seperti telepon hotel, keyboard atau tombol flush di toilet. Gambarannya seperti ini: ketika Anda menekan

seperti *remote* tv dan permukaan toilet.

Trik lainnya adalah agar *traveler* menghindari memegang mulut atau wajah setelah memegang area yang rawan bakteri. Soalnya, bakteri bisa menyebar melalui tangan dan masuk ke dalam tubuh lewat mulut atau wajah.

Namun dari semuanya, ada satu cara paling penting untuk mencegah masuknya bakteri dari kamar hotel ke tubuh kita. Caranya pun cukup sederhana. Cuci tangan Anda sering-sering. Bagaimana? Jadi sudah tahu kan area mana di kamar hotel yang rawan bakteri. Semoga berguna ya *traveler!*****



BEBEK PEKING WARISAN DINASTI YUAN

Bebek Peking merupakan olahan daging bebek panggang yang berasal dari China. Nama Peking sendiri diambil dari nama kota Beijing di zaman dahulu. Menurut catatan sejarahnya sendiri, bebek Peking berasal dari Dinasty Yuan pada tahun 1200an. Seperti yang tertulis dalam buku *The complete Recipes for Dishes and Beverages* pada tahun 1330, resep bebek Peking ternyata telah dicuri oleh seorang yang tidak dikenal. Usut punya usut pencuri tersebut berasal dari dalam istana yang bekerjasama dengan orang luar.

Akibat pencurian tersebut, resep bebek Peking kemudian tersebar luas. Akibatnya para rakyat jelata dan masyarakat awam bisa membuat bebek peking ini sehingga membuat makanan lezat ini menjadi populer di kalangan masyarakat Tionghoa. Berikut ini resepnya:

BAHAN SAUS BEBEK PEKING:

- ✓ 6 sendok makan gula pasir
- ✓ 6 sendok makan kecap manis
- ✓ 1 sendok teh garam
- ✓ 125 ml air
- ✓ 2½ sendok makan minyak wijen

CARA MEMBUAT:

- ▶ Campurkan semua bahan saus (kecuali minyak wijen).
- ▶ Panaskan minyak wijen, kemudian masukan campuran bahan saus ke dalam minyak wijen yang mendidih.
- ▶ Goreng sebentar sampai kental sempurna.

BAHAN BEBEK PEKING:

- ✓ 1 ekor bebek
- ✓ 7 sendok makan madu
- ✓ 1 sendok teh garam
- ✓ 3 cm jahe, kupas lalu parut
- ✓ 1/4 liter air

CARA MEMBUAT BEBEK PEKING:

- ▶ Siapkan wadah besar dan air panas (baru mendidih).
- ▶ Letakan daging bebek tadi ke dalam wadah tersebut, lalu siram dengan air mendidih tadi.
- ▶ Setelah selesai, lap daging tersebut dengan menggunakan kain bersih sampai mengering sempurna.
- ▶ Diamkan sejenak. Campurkan madu, garam, jahe, dan air menjadi satu.
- ▶ Aduk-aduk sampai semua bahan tadi tercampur secara merata.
- ▶ Oleskan campuran madu tersebut secara merata ke seluruh bagian daging bebek, terutama bagian-bagian dalamnya.
- ▶ Setelah mengoleskan semua campuran madu, masukan daging bebek tersebut ke dalam lemari pendingin (kulkas) kurang lebih selama 2-3 jam.
- ▶ Kemudian masukan loyang berisi daging bebek kedalam oven kurang lebih selama 50-60 menit dengan suhu sekitar 150 derajat celsius.
- ▶ Setelah melewati 1 jam dalam oven, balik bebek tersebut lagi agar bagian lain juga bisa matang selama kurang lebih 40 menit.
- ▶ Apabila daging bebek sudah berubah warna menjadi agak kecoklatan, ambil dan sajikan selagi masih hangat-hangatnya.

Selamat mencoba....

SARASEHAN NASIONAL MERAWAT PERDAMAIAN

INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, ADIL



INCIDENT CYBER SIMULATION EXERCISE



R DARI RESOLUSI KONFLIK DAN DAMAI DI MALUKU & M
ITUK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN



WAKIL PRESIDEN RI JUSUF KALLA SEBAGAI PEMBICARA UTAMA

DALAM SARASEHAN NASIONAL MERAWAT PERDAMAIAN TANGGAL 10-11 JULI 2018